

Bhinneka Tunggal Ika:

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 1 Issue 1, November 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

TRISAKTI, PANCASILA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia. E-mail:

wasisto.raharjo.jati@brin.go.id

Abstarct: *Understanding Trisakti as one of Sukarno's opus magnum thoughts is the biggest contribution to our nationalism. Trisakti, which contains three main words, namely politically sovereign, economically independent and culturally individual, is a series of words on how to make a nation strong and independent. This is what makes Trisakti an interesting keyword in explaining political constellations both at home and abroad, especially when it was announced during the *vivere pericoloso* years. The Trisakti concept itself then disappeared with the fall of Sukarno's government and the New Order. In the following period, what Sukarno was worried about occurred, namely the strengthening of the mentality of inlanders, compradors, opportunists, corruptors and collaborators. So in the current context, it is very urgent and significant that we need to prioritize Trisakti as part of the nation's solution-solving narrative, especially in changing these mentalities. This article will further elaborate on the context of Trisakti in the contemporary era, connected with the strengthening of globalization and the development of national character.*

Keywords: *Trisakti; Revolution; Changes in Mindset and Mentality; Five Amulets.*

Abstrak: Pemahaman Trisakti sebagai salah satu *opus magnum* pemikiran Sukarno sendiri merupakan sumbangan terbesar dalam nasionalisme kita. Trisakti yang memuat tiga kata utama yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya adalah serangkaian kata bagaimana membuat bangsa menjadi kuat dan mandiri. Hal itulah yang menjadikan Trisakti ini menjadi kata kunci menarik dalam menjelaskan konstelasi politik baik dalam maupun luar negeri, terlebih lagi dikumandangkannya tahun-tahun-tahun *vivere pericoloso*. Konsepsi Trisakti sendiri kemudian lenyap seiring dengan jatuhnya pemerintahan Sukarno dengan Orde Baru. Pada periode selanjutnya itulah, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Sukarno yakni menguatnya mental *inlander*, *komprador*, *oportunis*, *koruptif*, maupun *kolaborator*. Maka dalam konteks kekinian, sangatlah urgen dan signifikan bila kita perlu mengedepankan Trisakti sebagai bagian narasi pemecah solusi bangsa terutama dalam merombak mental-mental tersebut. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai konteks Trisakti dalam era kontemporer dihubungkan dengan menguatnya globalisasi dan pembangunan karakter bangsa.

Kata Kunci: Trisakti; Revolusi; Perubahan Mindset dan Mental; Panca Azimat.

1. Pendahuluan

Konsep Trisakti sendiri digulirkan oleh Bung Karno pada pidato peringatan Hari Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 1964 di Istana Negara. Pidato yang dinamakan sebagai Tahun *Vivere Pericoloso* sendiri dimaknai sebagai tahun tahun yang menyerempet bahaya. Sukarno menilai bahwa tahun-tahun itu merupakan periode tahun yang berbahaya bagi Indonesia maupun bagi Indonesia. Dalam konteks dunia, Sukarno melihat adanya upaya kolonialisme baru yang hendak dilancarkan oleh bangsa-bangsa Barat yang tergabung dalam *Old Emerging Forces* (Oldefos). Oldefos sendiri merupakan manifestasi daripada kekuatan imperialis baru yang melancarkan berbagai macam kooptasi melalui serangkaian bentuk produk ekonomi maupun budaya sebagai medianya. Hal itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh Sukarno dalam propagandanya *nation character building*. Adanya penetrasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat inilah yang sejatinya akan mengancam pola pembangunan karakter bangsa. Pada akhirnya yang kemudian menciptakan adanya depedensi sosial dan budaya dari bangsa-bangsa paska dekolonisasi (W. R. Jati, 2013). Adanya *New Emerging Forces* (Nefos) sendiri seharusnya menjadi penyeimbang dalam konstelasi global perlu untuk ditampilkan dalam pembangunan ekonomi dunia yang baru. Dalam nukilan pidato Sukarno yang lainnya berjudul *To Build New World* yang disampaikan pada sidang umum PBB, Sukarno banyak meytir tentang kontestasi antara *Nefos* maupun *Oldefos* tersebut dimana konteks rekolonialisasi begitu mengemuka dalam skema penjajahan mental dan perilaku. Hal itulah yang mendorong Sukarno untuk mendorong terbentuknya adanya revolusi yang dilakukan secara menyeluruh di segenap aspek bangsa dengan memperkuat jati diri bangsa tersebut (Jati, 2013: 166). Revolusi itu sendiri sangatlah tergantung pada konteks rezim itu berlangsung bagaimana modus perombakana atas sistem lama dengan sistem baru diubah dengan secara cepat, tepat mengakar dalam masyarakat meluas. Hal itulah yang menjadikan proses internalisasi perlu untuk segera dilaksanakan sebagai benteng diri terhadap pengaruh budaya asing.

Caranya untuk memperkuat jati diri bangsa itulah yang kemudian oleh Sukarno menciptakan adanya Trisakti sebagai fundamental dalam membangun karakter bangsa. Dinamakan sedemikian, karena konsep ini berdasarkan pada ketiga hal yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, maupun berkepribadian secara budaya. Sukarno melalui Trisaktinya sendiri melambangkan adanya internalisasi kepada masyarakat perlu segera untuk digalakkan dan dilaksanakan secara menyeluruh. Revolusi sistem lama tersebut adalah dengan cara mengganti pola pikir maupun *mindset* yang merupakan warisan daripada zaman kolonial yang utamanya berciri khasan feodalisme maupun komprador menjadi lebih nasionalistik dan lebih mengedepankan kepentingan nasional.

Namun sebelum Trisakti itu dijabarkan secara menyeluruh oleh Sukarno pada tahun 1965 dan sesudahnya. Rezim Sukarno sudah terlebih dahulu digulingkan oleh suatu gerakan *coup* yang dirancang secara sistematis oleh militer pimpinan Mayjend Soeharto sebagai “dalang intelektual”. Sejak itulah

kemudian, segala macam bentuk praktik DeSukarnoisasi dijalankan begitu masif berikut pula bentuk produk ideologinya yang terlahir pada era 1960 hingga 1965 seperti halnya Manipol Usdek, maupun Demokrasi Terpimpin kemudian diberangus menjadi ajaran yang terlarang. Adapun untuk Pancasila sendiri yang juga menjadi dasar negara sendiri, rezim Orde Baru sendiri tidak berniat untuk mengubahnya. Namun kemudian hanya berusaha untuk memberhalakannya secara normatif hapalan melalui Eka Prasetya Pancakarsa yang digalakkan oleh BP7. Adanya pemaksaan ideologi Pancasila yang terlalu represif-normatif selama Orde Baru tersebut yang berimbas pada konteks deideologisasi yang terjadi di masyarakat (Aspinall & Fealy, 2010).

Secara umum terdapat enam politik aliran baru berbasis ideologi, yang uniknya Marxisme maupun ideologi kiri yang selama Orde Baru dikooptasi, mulai tumbuh lagi seperti yang pernah terekspos dengan munculnya Blog “Partai Komunis Indonesia 2000” beberapa waktu lalu. Enam aliran itu seperti kiri radikal, kiri moderat, kanan-konservatif, kanan liberal, dan islamisme. Terdapat tiga ideologi yang berkembang pesat di akar rumput masyarakat Indonesia seperti nasionalis-Sukarno, islamisme, dan modernisme (W. Jati, 2017; W. R. Jati, 2024). Nasionalis berkembang pesat di kalangan kelompok marginal, islamisme berkembang melalui jaringan tarbiyah kampus, pesantren, maupun kelompok diskusi halaqah yang berkembang di dunia aktivis, dan modernisme merupakan ideologi kaum urban dan kelas menengah baru yang tengah mengalami peningkatan kesejahteraan (Abdullah & Mohamed Osman, 2018). Modernisme juga berarti ideologi apatis yang menginginkan tidak ada perubahan radikal dalam pemerintahan. Pancasila lagi-lagi menjadi senjata bagi kaum nasionalis untuk meningkatkan citra dan elektabilitas di kalangan masyarakat. Pancasila kemudian direproduksi ulang hanya demi kepentingan kuasa dan bukan sebagai payung bagi semua masyarakat Indonesia (Iskandar, 2016).

Barangkali memang benar kalau Pancasila adalah gagasan ideologi yang kuat dari segi konsep, namun lemah dari segi implementasi karena hanya menjadi hiasan dinding, bahan diklat, dan protokoler upacara bendera yang sifatnya hanya seremonial dan komplementer. Sulit bagi kita untuk menemukan penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena semua orang telah terdeideologisasi oleh keadaan yang serbakompromistis. Maka dengan melihat situasi kondisi kontemporer yang serba sengkabut, dan hal itu ditambah kembali dengan maraknya globalisasi yang melakukan infiltrasi yang sebegitu masif masuk dalam ke segenap jantung dan sendi masyarakat Indonesia melalui berbagai macam produknya.

Hal itulah yang mendesak adanya amanat Trisakti untuk diimplementasikan kembali ke dalam ranah masyarakat Indonesia secara meluas. Trisakti sendiri merupakan salah satu bentuk Panca Azimat yang dibentuk oleh pemikiran Sukarno selama kurun waktu 1925 dari semula Pancasila hingga yang mutakhir adalah Berdikari pada tahun 1965. Adapun konteks tahun *Vivere Pericoloso* yang pernah diucapkan oleh Bung Karno pada tahun 1964 memiliki kemiripan dengan tahun-tahun sekarang ini. Jikalau *Vivere*

Pericoloso nya Bung Karno lebih mendekati pada kontestasi global Nefos dan Oldes sehingga memunculkan pada konsepsi neo kolonialisme maupun neo imperialisme. Maka *Vivere Pericoloso* pada era kontemporer lebih melihat bagaimana konteks degradasi moral dan etika yang kian menipis di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, konsep Trisakti menjadi urgen dan signifikan untuk diimplementasikan. Namun sebelum mengarah pada pembahasan ke dalam kaitannya dengan globalisasi maupun pembangunan karakter bangsa. Terlebih dahulu, kita perlu memahami tentang pemaknaan Trisakti tersebut, yakni bagaimana konsepsinya dan bentuk pengamalan praksis ke dalam masyarakat Indonesia.

2. Trisakti dan Pancasila Bung Karno sebagai bagian Panca Azimat

Pancasila sebagai dasar negara sendiri dapat diartikan dalam ideologi (*Weltanschauung*) yakni nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan “Panca Azimat” atau lima konsep kebangsaan dan keindonesiaan yang dikonsepsikan oleh Bung Karno, yang terdiri dari Pancasila, Manipol, Trisakti, dan juga Berdikari. Dengan demikian, sebenarnya Pancasila secara ideal adalah bagian dari ideologi komprehensif yang digagas oleh Bung Karno.

Sebagai bagian dari proses pembangunan ideologi bangsa, Bung Karno menitikberatkan kepada proses tata kelola, tata nilai, dan juga tata kesejahteraan. Ketiga nilai pada dasarnya mewakili secara empiris cita-cita bangsa dan negara yang sebagaimana dikonsepsikan oleh Bung Karno. Tata kelola lebih pada upaya sebagai regulator dan administrator dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini lebih lekat pada konsep Manipol. Sedangkan tata nilai ini lebih pada panduan nilai dasar filosofis sebagai pandangan hidup, tujuan bernegara, maupun juga dasar konstitusi yang lebih lekat pada Pancasila. Sedangkan tata kesejahteraan lebih kepada upaya membangun kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dan seluasnya berbasiskan pada nilai berdikari dan trisakti.

Secara lebih khusus, Pancasila sebagai tata nilai meliputi berbagai macam aspek yang mau diuraikan seperti halnya ranah mental yang termaktub dalam sila 1, 2, dan 3 dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang religius, berperikemanusiaan, egaliter, dan bersedia untuk bergotong royong dan tenggang rasa. Adapun ranah institusional sendiri lebih pada penjabaran sila 4 yakni negara hukum yang dicapai oleh lewat demokrasi permusyawaratan demi tegaknya keadilan dan persatuan (Bo’a, 2018). Selain itu ranah materal terutama dalam sila 5 lebih kepada perekonomian yang didasarkan pada tujuan dan kebaikan bersama.

Sejalan dengan 3 ranah dalam Pancasila itu, konsepsi Trisakti sendiri sangatlah terkait dengan upaya Bung Karno dalam menegaskan identitas sebagai sebuah bangsa merdeka dan mandiri itu sendiri. Sosok Sukarno pun mafhum dan mengerti bahwa pembangunan sebuah bangsa untuk menjadi bangsa yang besar haruslah dimulai bagaimana negara itu mau membangun *nation character*

building-nya terlebih. Dalam pengalaman berbagai negara-negara maju, adanya internalisasi nilai-nilai nasional-lokal menjadi kekuatan mobilitas bangsa. Eropa dan Amerika bisa menjadi maju karena spirit Calvinis yang diambil dari akar-akar pemikiran Judeo-Christiani bahwa kemajuan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, namun bagaimana manusia sendiri kemudian dapat mengejar takdir Tuhan tersebut agar menjadi maju. Asia Timur terlebih Jepang, China, maupun Korea menjadi kuat dan maju dikarenakan spirit menjadi maju yang kuat. Jepang memiliki spirit Bushido yang menerapkan adanya kedisiplinan maupun etos kerja yang begitu tinggi dalam merengkuh kemakmuran maupun kesejahteraan. China maupun Korea menjadi maju dalam penguasaan teknologi karena adanya ajaran Konfusianisme yang kuat terlebih dalam konsep *dao* (jalan) maupun *ren* (kesejahteraan) bahwa kemakmuran sendiri sudah ada jalannya sendiri, namaun bagaimana kita bisa mengoptimalkan adanya jalan tersebut menuju ke sana.

Pentingnya sebuah nilai bagi sebuah bangsa dalam membangun karakternya terlebih dahulu sebelum membangun pembangunan peradaban., itulah yang kemudian menjiwai Sukarno dalam menjaga memontum agar memperbaiki mentalitas bangsanya terlebih dahulu. Pengalaman kolonialisme selama berabad-abad yang kemudian berimplikasi pada pembentukan mental-mental *inlander* bagi mayoritas pribumi Indonesia. Adanya mental *inlander* itulah yang kemudian menciptakan adanya inferioritas maupun subjugasi bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat. Kita menjadi mudah takjub akan penemuan teknologi yang dihasilkan oleh Barat. Kita mudah terpengaruh dengan cara model berpakaian dilakukan oleh bangsa lain yang melabelkan dirinya sebagai modern dan maju. Kita juga menjadi terjerembab manakala peradaban kita dipandang belum sepadan oleh negara maju tersebut.

Adanya mentalitas itulah yang sebenarnya perlu untuk diubah dan dirombak dalam pemikiran Bung Karno sendiri (Huda, 2018). Jikalau melihat secara retrospektif ke belakang, bangsa Indonesia sesungguhnya juga memiliki peradaban yang unggul dan maju bahkan melebihi masanya. Adanya mahakarya berupa Candi Borobodur, Prambanan, maupun artefak serta produk-produk teknologi lainnya di masa lampau yang hingga kini masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita sesungguhnya merupakan bentuk sah daripada keunggulan peradaban nusantara yang sebenarnya. Hanya kita ini karena mengalami politik inferioritas itulah yang menghasilkan manusia-manusia *inlander* yang turunannya bisa kita simak seperti halnya mental komprador, koruptor, kolaborator, kleptokrat, maupun mental-mental negatif lainnya itulah yang menjadikan mentalitas bangsa menjadi menurun (Wandani & Dewi, 2021).

Eksperimentasi pengalaman kolonialisme yang berkelindan dengan bobroknya mental bangsa itulah yang kemudian coba untuk dianalisis Bung Karno sebagai cara untuk memperbaiki mental bangsanya yang baru mengalami masa dekolonisasi, agar secara cepat bangkit menjadi bangsa besar seperti yang tergambarkan dalam romantika historiografi perjalanan bangsa. Oleh karena itulah kemudian, digulirkanlah Trisakti sebagai cara membangkitkan mental kejayaan nusantara tersebut. Trisakti sendiri dipilih Sukarno sebagai

bentuk penggambaran atas ketiga masalah yang perlu untuk dibenahi segera oleh bangsa secara cepat. Secara politik, bangsa Indonesia masih belum bisa menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa karena masih kuatnya hubungan aliansi pusat-satelit pasca dekolonisasi antara negara *colonizer* dengan negara *colonized*. Yang artinya bahwa masih kuatnya hubungan interdependensi kepada *colonizer* baik itu berupa patronase ekonomi maupun patronase politik. Secara ekonomi, bangsa Indonesia juga mengalami adanya ketergantungan akan pasokan bantuan ekonomi asing dalam rangka membangun perekonomiannya secara mandiri. Namun tak disangka, bahwa perekonomian nasional justru dihisap melalui adanya komprador-borjuasi nasional yang berkongsi dengan global dalam meraih keuntungan secara privat. Secara budaya, mentalitas terjajah menjadikan bangsa ini lupa akan semangat gotong royong menjadi modal sosial dalam meneguhkan solidaritas politik maupun ekonomi. Budaya yang teracuni dengan esensi individualisme dan liberalisme yang ditanamkan dalam skema *free fight liberalism*.

Maka adanya kristalisasi nilai-nilai Trisakti sendiri seperti halnya berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, maupun berkepribadian secara budaya perlu untuk diejawantahkan dalam skema revolusi yang dicanangkan oleh Bung Karno sendiri. Adanya tahun-tahun *vivere pericoloso* sebagaimana yang dimaksudkan Sukarno dalam tahun menyerempet bahaya. Bahaya disini dimaksudkan sebagai titik tolak bagi bangsa ini merubah mentalitas komprador tersebut menjadi lebih baik. Selain itu pula, adanya revolusi tersebut berarti adanya upaya untuk penemuan kembali garis-garis perjuangan baru yang perlu untuk dinomenklaturkan dalam tujuan yang hendak dicapai ke depannya. Maka dari itu, perjuangan tersebut seperlunya untuk digalakkan dalam konsep Trisakti.

Peneluran Trisakti sendiri memang sangat dipengaruhi oleh konstelasi global yang berkembang dan ketika Indonesia memang negara yang sangat strategis dalam pengaruh global tersebut. Baik Uni Soviet dari Blok Timur maupun Amerika Serikat dari Blok Barat sendiri berupaya untuk memperebutkan pengaruh dan menancapkan hegemoninya di berbagai kawasan. Sukarno melihat adanya sikap yang jelas untuk menegaskan diri sebagai bangsa merdeka dan mandiri yang tergabung dalam negara-negara Non Blok. Oleh karena itulah, perlu adanya garis ideologis yang baru untuk memperkuat solidaritas negara-negara non blok yang juga sama-sama membangun *nation character building*-nya. Ajaran Sukarno tentang Trisakti rupanya telah menarik banyak minat banyak negara untuk mengadopsinya sebagai sebuah garis perjuangan revolusi. Misalnya saja, negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka seperti halnya Kuba, India, Vietnam, maupun negara-negara Amerika Selatan lainnya mengadopsi Trisakti sebagai modus penyelenggaraan negara sendiri.

Adapun jika ditelisik lebih mendalam dalam mendedah konsep pemikiran Trisakti sendiri pada dasarnya juga merupakan bentuk kristalisasi dari berbagai macam ideologi yang dipelajari oleh Bung Karno. Dalam konsepsi pertama yakni, *berdaulat secara politik*. Pemikiran mengenai *berdaulat secara politik* sendiri

banyak diilhami semangat revolusi Prancis *egalite, fraternite, dan liberte* maupun *Declaration of Independence* Amerika Serikat yakni *free of will, freedom to speech, maupun freedom to pursue happiness*. Hal itulah yang kemudian diejawantahkan oleh Sukarno dalam konsepsi berdaulat secara politiknya adalah *l'desire et ensemble* (kemauan untuk bersatu). Maka kata berdaulat inilah yang menjadi kata sakti untuk menjelaskan adanya kemauan dan determinisme suatu bangsa untuk menegaskan dirinya sebagai bangsa yang bebas.

Dengan adanya kemauan untuk bebas dan mandiri itulah yang membuat Sukarno mengedepankan konsep berdaulat untuk bisa menegaskan prinsip baik dalam mengelola tata pemerintahan republic tanpa ada intervensionisme dari pihak luar dan juga adanya keinginan untuk menjalin relasi dengan negara lain dalam tataran yang seimbang dan menguntungkan. Sukarno dalam konsepsinya “berdaulat secara politik” tersebut memang menekankan dua hal tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan. Adanya intervensi asing ini memang rawan terjadi dalam menjalankan roda pemerintahan. Seringkali muncul adanya agen-agen asing yang menyaru menjadi pejabat nasional di lingkaran kekuasaan untuk menyetir agenda negara sesuai dengan pesanan asing. Selain itu dalam pembangunan relasi dengan negara-negara asing. Acap kali juga ditemui adanya relasi tidak seimbang dan justru mengarah pada parasitisme. Hal ini biasanya terjadi dalam relasi kasus antara negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga dimana selalu saja terjadi pola dominasi maupun subordinasi antar keduanya.

Maka dari itulah kemudian, negara itu perlu berdaulat dan bisa menegaskan adanya sikap dan prinsipnya dalam membangun negaranya sendiri. Caranya adalah merubah mentalitas *inlander* dan komprador dalam tubuh pemerintahan agar tidak selalui menjadi klientelisme antek siang. Sukarno mengakui bahwa jalan untuk menuju secara berdaulat secara nyata dan penuh sendiri memang harus dijalani dengan jalan terjal. Salah satunya tentu adalah tekanan politik baik dalam negeri maupun luar negeri yang kian menghimpit. Namun demikian ketika menjadi berdaulat. Implikasinya adalah harga diri sebagai sebuah bangsa yang akan didapatkan

Prognosis futuristik Sukarno mengenai adanya intervensionisme maupun relasi tidak seimbang tersebut kini justru terjadi dalam konstelasi global. Indikasinya adalah munculnya para *jackal* sebagai bentuk komprador-komprador asing yang bekerja atas nama kapitalis Barat di negara dunia ketiga. Hal itulah yang kemudian menciptakan adanya relasi patrimonialisme global yang kinin sudah berkembang *world order* dimana negara maju menyetir kebijakan negara berkembang. Relasi antar negara kemudian menjadi tidak seimbang, manakala terjadi pemaksaan kepentingan nasional terhadap kepentingan nasional suatu negara lainnya. Artinya bahwa konstelasi politik kawasan yang diterapkan oleh negara-negara maju sendiri telah menjadikan negara berkembang menjadi objek pasif dan bukan sebagai subjek aktif.

Konsepsi Trisakti yang kedua yakni *berdikari secara ekonomi* mengindikasikan adanya bentuk pendayagunaan ekonomi secara nasional yang

dijalankan oleh suatu negara dengan sistem sendiri. Melalui berdikari secara ekonomi, sebenarnya sudah dijalankan melalui pasal 33 UUD 1945 yang bisa dijabarkan sebagai soko guru Demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi yang dijalankan dalam skema berdikari sendiri bukanlah nanti mengarahkan kepada sistem etatisme dimana negara berperan sebagai aktor tunggal dalam menjalankan sistem ekonomi (Latif, 2020). Negara perlu memandang perekonomian sendiri bentuk asset strategis yang perlu dikuasai dan disinergiskan dengan borjuasi nasional. Dikatakan penguasaan atas sumebr ekonomi sendiri merupakan bentuk penguasaan atas hajat hidup orang banyak. Maka dari itulah ketika perekonomian sendiri dikuasai negara, sangatlah penting negara untuk menguasai pola redistribusi akan kesejahteraan dan kemakmuran nasional merata di kalangan anggota masyarakat.

Namun juga perlu mengedepankan adanya pengembangan berbagai macam borjuasi nasional sebagai pilar ekonomi juga. Konsepsi borjuasi nasional yang dikedepankan oleh Sukarno dalam konsepsinya merupakan pengembangan daripada borjuasi kecil (*petty bourgeoisies*) untuk kemudian berkembang menjadi borjuasi besar. Adanya pengembangan borjuasi nasional tersebut merupakan strategi agar pembangunan ekonomi sendiri dijalankan atas berdasar karakter ekonomi sendiri dan hasilnya bisa dinikmati secara maksimal dan bersama. Pengembangan borjuasi nasional (bornas) yang dikonsep Sukarno pada dasarnya mereduksi adanya *free fight liberalism* yang merupaka bentuk diskresi daripada kapitalisme lanjutan. Borjuasi nasional juga dibentuk menghindari adanya kapitalisme rente yang acap kali hadir manakala borjuasi sendiri menjadi tidak berkembang dan malah mengarahkan kepada hubungan depedensi ekonomi antara borjuasi kepada negara.

Berdikari secara ekonomi juga bisa dipahami sebagai bentuk pengembangan-pengembangan potensi ekonomi yang bisa digerakkan menjadi sumber ekonomi utama. Basis utama pengembangan risorsis ekonomi dalam negara dunia ketiga pada dasarnya adalah *material raw* berupa sumber daya alam mentah. Oleh karena itulah, model ekonomi yang dijalankan haruslah adalah Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) yang mengedepankan adanya transfer dan alih teknologi daripada hanya Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE) yang hanya mengandalkan pada basis *raw material* saja. Hal itulah kemudian menimbulkan adanya ketimpangan dalam pendapatan. Dalam konsepsi berdikari secara ekonomi juga disebutkan bahwa, sebagai negara Indonesia yang masih dalam proses pembangunan ekonominya dari berbasis agraris-ekstratif menuju industrialis-manufaktur tentu juga memerlukan pembaharuan dalam merubah moda produksi tersebut.

Hal itulah yang kemudian mendorong adanya pembentukan aliansi kerjasama ekonomi yang mutual antara negara maju dengan negara berkembang, tanpa ada proses alienasi terhadap kepentingan ekonomi tertentu. Adanya keinginan besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari itulah, Sukarno membangun sektor perekonomian sendiri direstorasi dengan cara mengirimkan para sarjana untuk studi belajar ke luar negeri, yang hasilnya kemudian setelah

pulang studi bisa diterapkan untuk membangun industrialisasi. Sukarno sebenarnya meniru semangat *bushido* dalam konsepsi berdikari ini dengan cara membangun perekonomian nasionalnya dengan bantuan asistensi asing. Selain itu pula, berdikari ekonomi juga perlu dijelaskan dalam semangat Gandhi dalam menjelaskan konsepsi pembangunan India. Adapun semangat Gandhi tersebut dijelaskan dalam berbagai bentuk nilai seperti, *swadeshi* (menggunakan produk dalam negeri). Sukarno berupaya untuk membangun industrialisasi ekonominya berbasis kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Sukarno, 2013: 65).

Oleh karena itulah, Sukarno sendiri kemudian memberlakukan praktik restriksi terhadap produk-produk asing ke dalam perekonomian dalam negeri. Maka pada tahun 1960-1965an, Sukarno melakukan praktik dewesternisasi yakni pelarangan terhadap produk Barat entah itu produk konsumsi, produk budaya, maupun produk teknologi pada masa itu. Kondisi tersebut menimbulkan adanya *cultural shocked* yang dialami oleh periode Indonesia kala itu. Stigmatisasi adanya Indonesia yang ketinggalan jaman begitu mengemuka kala itu di mata dunia. Namun yang perlu dicatat adalah Indonesia kala itu sedang berupaya untuk membangun perekonomian domestiknya dengan mengandalkan pada industrialisasi lokal dengan bantuan para teknokrat yang dididik oleh didikan luar negeri.

Contoh riil dari penerapan berdikari ekonomi sendiri diterapkan dalam kasus Korea Utara yang kini mengedepankan ideologi *juche*. *Juche* dalam bahasa Korea sendiri dimaknai sebagai kemandirian. Konsep ini sebenarnya sangatlah mirip dengan etatisme yang mengedepankan adanya kemampuan ekonomi nasional sendiri. Negara menjadi aktor dan motivator tunggal dalam membangun ekonominya secara menyeluruh dan komprehensif. Implikasinya kemudian, Korea Utara, Kuba, maupun negara-negara lainnya yang menerapkan adanya berdikari ekonomi kini mampu berkembang menjadi bangsa mandiri tanpa adanya asistensi hipokrit yang ditampilkan oleh bangsa maupun lembaga multinasional lainnya. Indonesia yang menemukan konsepsi berdikari secara ekonomi sendiri justru lebih mengarahkan dirinya sebagai agen kapitalis-komprador bagi kekuatan multinasional global.

Adapun konsepsi berkepribadian secara budaya dimaknai sebagai upaya untuk memahami perubahan mendasar dalam konstelasi budaya di Indonesia. Adanya budaya yang perlu untuk diejawantahkan dalam proses perumusan budaya kita yang nasional dan hakiki. Dalam konteks ini, yang perlu dilawan Sukarno adalah esensi *liberalism* maupun budaya hedonistik yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Dalam alam pemikiran Sukarno sendiri, pemikiran budaya *adiluhung* yang penting adalah esensinya semangat gotong royong maupun *tepo seliro* yang perlu untuk dikembali dijabarkan dalam garis besar kepribadian Indonesia yang perlu untuk dieksekusi lebih lanjut.

Dalam konsepsi mengenai kepribadian secara budaya, itu lebih menekankan kepada bentuk revolusi mental yang hendak untuk diubah dan dirombak. Mentalitas *inlander* inilah yang perlu untuk dilakukan pencerahan atau dalam bahasa Sukarno sendiri mengarahkan kepada bentuk penemuan jati

diri kembali. Sukarno sendiri mengemukakan itu sebagai esensi mendasar dari Trisakti. Maka akan sangatlah percuma, apabila kemudian pada konteks sekarang ini, Trisakti justru dilupakan dan hiraukan oleh elemen masyarakat Indonesia secara luas dan menyeluruh. Inilah yang semestinya menjadi dilemma tersendiri manakala Trisakti sendiri kemudian teralineasikan dalam konteks masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan adanya upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi terhadap revolusi mental tersebut. Maka penjabaran Trisakti sendiri kemudian perlu untuk direlasikan dengan pembangunan karakter bangsa dengan konteks globalisasi kekinian.

3. Pancasila, Trisakti, dan Pembangunan Karakter Bangsa

Titik tekan dalam memahami konsep Trisakti sebenarnya adalah terletak pada kandungan makna yang berada di dalamnya. Makna tersebut dapat diinterpretasikan berbagai macam sebagai spirit, esensi, maupun bentuk kohesinya. Makna utama yang dibangun oleh Sukarno dalam Trisaktinya adalah membangun mental. Penekanan pada aspek mental dikarenakan hal itu merupakan bagian krusial dalam menentukan desain besar arah bangsa ke depan. Sukarno dalam hal ini memang sangatlah antipati dengan kolonialisme maupun juga bentuk imperialisme. Prognosis yang dibangun oleh Sukarno terkait dengan kolonialisme dan imperialisme baru adalah terkait dengan internal kolonialisme. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa, mental *inlander* merupakan embrio dari terbentuknya sikap politik komprador dan elitisme yang pada akhirnya kemudian menjadi agen penjajahan atas bangsa sendiri.

Adapun konsep Trisakti sebagai manifestasi revolusi mental dan juga proses pembangunan karakter bangsa seperti yang diwujudkan oleh Sukarno lebih melihat pada dimensi inkorporasi nilai gotong royong, kebersahajaan, maupun modernitas. Inkorporasi Sukarno sendiri dilakukan secara represif maupun koersif kepada semua unsur tatanan kelembangaan maupun juga pada publik. Adanya pemaksaan yang dilakukan Sukarno bukanlah dilakukan tanpa alasan pasti. Sukarno melihat adanya kontinuitas terhadap masa-masa *vivere pericoloso* yang akan terjadi pada konstelasi global yang diwujudkan pada infiltrasi nilai-nilai asing akan menghancurkan pada spirit nilai-nilai kebangsaan maupun nasionalisme. Yang kemudian kini kita kenal sebagai bentuk globalisasi maupun juga globalisme budaya.

Trisakti kemudian ditempatkan sebagai bentuk filterisasi maupun juga bentuk resistensi budaya bangsa Indonesia. Paska kejatuhan Orde Lama, kita bisa melihat implementasi Trisakti kemudian mengalami berbagai kemunduran. Langkah pragmatis dan progamtik dengan cara melegalkan Trilogi yang secara substansi sangatlah semu dan berorientasi pada pemenuhan elite politico-ekonomi yang kemudian menjadi bibit-bibit awal penjajahan terhadap bangsa sendiri. Maka revitalisasi trisakti sebagai bagian penting dalam membenahi mental tersebut. Baik selama masa reformasi hingga pada masa demokrasi sekarang ini, pencarian atas nilai-nilai kebangsaan belumlah usai sama sekali. GBHN yang dulu ditetapkan sebagai garis besar sebenarnya merupakan hal

esensial dan konstruktif dalam menerapkan orientasi perjalanan bangsa ke depannya.

Terminologi pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) sendiri sangatlah erat kaitannya dengan upaya menjaga dan memperbaiki tataran etika, mental, maupun moralitas yang perlu untuk dijabarkan secara komprehensif. Tujuannya adalah jelas memperbaiki mentalitas bangsa dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar negara ke dalam setiap jiwa dan perilaku manusianya. Hal itulah yang sebenarnya diinginkan Sukarno melalui konsep Trisakti bahwa nantinya akan terjadi semacam pembentuk manusia-manusia Indonesia yang Pancasila. Trisakti sendiri pada dasarnya merupakan instrumentasi dalam pembentukan manusia Pancasila tersebut melalui pengembangan tujuan makro secara riil yang perlu segera dicapai. Oleh karena itulah, Trisakti sebenarnya adalah jalan menuju ke sana.

Tendensi *Vivere Pericoloso* sebagaimana yang dimaktubkan dalam gagasan Trisakti sebenarnya adalah merujuk pada *timing* yang tepat untuk segera merombak mentalitas dan jati diri bangsa. Selama ini dalam perjalanan republik hingga diciptakannya Trisakti pada tahun 1964 bisa terlihat bahwa perjalanan bangsa selama ini selalu saja terombang-ambing oleh segenap kekuatan politik luar maupun eksperimentasi sekaligus pula adanya pemaksaan ideologi dari luar. Hal itulah yang menjadi penyebab instabilitas dari kehidupan politik Indonesia selama masa awal republik yang sumber penyebab bisa berasal dari dalam maupun luar. Kondisi tersebut kemudian berkulminasi dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan adanya disorientasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin *chaotic* dengan adanya semakin berkecamuknya perang sipil-militer maupun pembangkangan sipil di berbagai daerah.

Adanya pergolakan yang semakin berkecamuk itulah yang membuat Indonesia terancam dalam bahaya disintegrasi yang lebih besar. Kondisi tersebut terjadi manakala persoalan akan identitas dan nasionalisme sendiri belumlah usai secara sepenuhnya. Pergolakan yang sifatnya fisik maupun kontra ideologis inilah menjadikan permasalahan domestic Indonesia untuk bertransformasi menuju negara maju menjadi lebih susah, karena senantiasa disibukkan oleh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan fundamental yang seharusnya bisa dijawab oleh masa sebelumnya,

Maka dengan adanya, penciptaan Trisakti sebenarnya adalah cara untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang baru sesuai dengan Pancasila. Adapun konsep pembangunan karakter manusia yang digagas oleh Sukarno sendiri bermakna agar manusia Indonesia sendiri menjadi figur yang berkarakter kuat dalam mengatasi segala macam permasalahan. Berdaulat secara politik jika disambungkan dengan pembentukan karakter bangsa dianalogikan sebagai bentuk penghapusan mental terjajah maupun inferior yang selama ini melekat secara inheren dalam pembentukan manusia Hindia Belanda dalam skema kolonialisme Belanda.

Adapun globalisasi yang menjadi ancaman dalam pembangunan karakter masa kini bersumber pada kelima sumber yakni *ethnoscapes*; (Jati, 2013), *technoscapes*, *financescapes*, ideoscapes (Appadurai, 1997). Adanya kelima sumber aliran global yang sifatnya trans nasional dan berkembang secara multinasional itulah yang kemudian bersinergi dalam melakukan infiltrasi ke berbagai macam belahan dunia inilah. Kuatnya arus infiltrasi kelima arus global itulah yang menyebabkan adanya ketahanan ideologi dan dasar negara perlu untuk diperkuat dan dipertebal. Konteks penerapan Trisakti pada abad 21 ini perlu untuk diperbarui kembali dalam bentuk gerakan pembaharuan dan revolusi itu sendiri perlu untuk direformasi agar sesuai dengan konteks kekinian.

Globalisasi yang sedemikian masif dan memikat yang bertumpu pada ideologi liberalisme dan modernisme sendiri memang menjadi sangat intimidatif jikalau tidak dikelola dengan secara baik dan konsisten. Penguatan dalam pemaknaan trisakti adalah kunci dalam menghadapi dunia yang semakin berubah dan bertambah. Oleh karena itulah, sudah saatnya kemudian Trisakti sendiri perlu untuk dihembuskan menjadi napas baru dalam perubahan revolusi mental di Indonesia.

4. Kesimpulan

Pembahasan mengenai konsep Trisakti pada dasarnya merupakan gagasan klasik namun memiliki pengaruh besar dalam memberikan operasionalisasi sebuah negara. Pidato Sukarno yang berjudul Tahun-tahun *Vivere Pericoloso* mengindikasikan inilah saatnya tepat untuk merubah mental maupun mindset bangsa pada tahun 1964 dan sesudahnya. Dikarenakan tahun itu merupakan titik genting dalam perubahan konstelasi global dimana terjadi perebutan hegemoni global, ditambah dengan adanya perebutan pengaruh dalam skala masif. Postulat Sukarno agar jangan ikut arus dan terombang-ambing dalam politik merupakan sesuatu yang benar dan perlu untuk digariskan kembali dalam trek yang sebenarnya.

Pengalaman Trisakti di masa sekarang, besuk, dan masa depan tentu merupakan bentuk keharusan yang harus dipenuhi jika bangsa ini merasa dirinya mampu menjadi pemain utama dalam pengarustamaan global. Kuncinya adalah bagaimana pemimpin tersebut mau menjabarkannya. Sekali lagi, konteks kepemimpinan masa kini menjadi penting untuk mengamalkan Trisakti kembali dijalankan dan diaksentuasikan sebagai model pengelolaan negara. Hal inilah yang mesti kita lihat, awas, dan teropong terhadap suksesi kepemimpinan ke depannya siapakah pemimpin yang mengamalkan Pancasila dan Trisakti itulah yang mesti dipilih.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N., & Mohamed Osman, M. N. (2018). Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 214–232. <https://doi.org/10.1080/20566093.2018.1525894>

- Aspinall, E., & Fealy, G. (2010). *Soeharto's New Order and Its Legacy*. ANU Press.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99.
- Iskandar, P. (2016). The Pancasila Delusion. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), 723–735. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1195430>
- Jati, W. (2017). *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*. LP3ES.
- Jati, W. R. (2013). *Indonesia kontemporer: Kompleksitas permasalahan*. CV Lingkarantarnusa.
- Jati, W. R. (2024). *Preferensi politik: Pemilih muslim Indonesia kontemporer*. Penerbit Buku Kompas.
- Latif, Y. (2020). Reaktualisasi Pancasila. *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi*.
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 34–39.